



Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat

Nur Asmawati¹, Suparman², Hendra Gunawan³

^{1,2,3}Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: nur.ningnong1606@gmail.com, suparman@uts.ac.id, hendra.gunawan@uts.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-12-03 Revised: 2024-01-15 Published: 2024-02-01	The purpose of this research is to determine implementation application system information local government on the device area in West Sumbawa Regency, Efforts are made to ensure continuity implementation application system information local government on the device areas in West Sumbawa Regency, and the obstacles faced in implementation application system information on the device area in West Sumbawa Regency. The research method used in study This that is descriptive qualitative. The data collection procedures used in this research are observation, interviews and documentation. The data analysis used includes data reduction, data presentation and withdrawal conclusion. The results of the research obtained implementation of regional government information system applications on devices area in West Sumbawa Regency, ten OPDs are used after analysis and they are running effectively based on the results of observations and interviews conducted directly. Conclusions that can be given: The implementation of regional government information system applications in regional apparatus in West Sumbawa Regency has been implemented well, efforts need to be made to ensure continuity implementation application system information local government by continuing to coordinate between related agencies to ensure SIPD runs smoothly. The obstacles faced _ namely increasing Human Resources and there is still no SOP related to SIPD.
Keywords: <i>Implementation;</i> <i>Application;</i> <i>Regional Apparatus;</i> <i>Information System.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-12-03 Direvisi: 2024-01-15 Dipublikasi: 2024-02-01	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah pada perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa Barat, upaya yang dilakukan untuk memastikan keberlanjutan implementasi aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah pada perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa Barat, dan kendala yang dihadapi dalam implementasi aplikasi sistem informasi pada perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan meliputi meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian didapatkan implementasi aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah pada perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa Barat menggunakan sepuluh OPD setelah di analisis sudah berjalan dengan efektif berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung. Kesimpulan yang dapat diberikan Implementasi aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah pada perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa Barat sudah diterapkan dengan baik, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk memastikan keberlanjutan implementasi aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah dengan tetap melakukan koordinasi antar dinas terkait untuk memastikan SIPD berjalan dengan lancar. Adapun kendala yang dihadapi yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia dan masih belum adanya SOP terkait SIPD.
Kata kunci: <i>Implementasi;</i> <i>Aplikasi;</i> <i>Perangkat Daerah;</i> <i>Sistem Informasi.</i>	

I. PENDAHULUAN

Peran Pemerintah sebagai pelayan masyarakat yaitu memberikan layanan inovatif bertujuan memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan warga. Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat, selain sebagai pelaksana tugas negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan

publik adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai meliputi penyediaan barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif oleh lembaga pemerintah (Atthahara, 2018).

Tercapainya pelayanan publik yang unggul merupakan salah satu aspek penting dari tata pemerintahan yang efektif (good government). Tujuan government adalah menciptakan sebuah sistem komunikasi yang menghubungkan

masyarakat, sektor swasta, dan entitas pemerintah lainnya dengan tujuan meningkatkan kelancaran interaksi, transaksi, dan pelayanan (Anggana, Gani, & Sarwono, 2015).

Pelayanan yang optimal yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga diharapkan untuk melakukan inovasi di sektor publik dengan fokus pada bidang dijelaskan dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Fokus utama inovasi di sektor publik adalah menghasilkan perbaikan melalui kegiatan inovatif. Tujuannya adalah agar pemerintah mampu memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, berkualitas, serta terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Eldo & Mutiarin, 2019). Sasaran utamanya adalah mempercepat penggunaan teknologi informasi sebagai upaya mengintegrasikan data pemerintah dan pemerintah daerah.

Upaya dalam melakukan pertanggungjawaban proses perencanaan, anggaran, dan penggunaan teknologi yaitu kewajiban yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah (Alfani & Nasution, 2022). Percepatan dalam menerapkan SIPD diharapkan dapat mengintegrasikan semua sistem yang terkait dengan data pembangunan dan keuangan daerah ke dalam SIPD. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri berperan dalam meningkatkan proses pengaturan dokumen perencanaan daerah agar sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 mengenai panduan teknis pengelolaan keuangan daerah, berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan dan mengendalikan anggaran

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah (Wurara, Kimbal, & Kumayas, 2020). SIPD adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan basis data elektronik dan juga perangkat lunak yang menggabungkan data pemerintah dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan penuh akuntabilitas dan transparansi (Citra, 2023). Manfaat yang didapatkan dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat mendorong pengembangan sistem data dan informasi pembangunan, informasi keuangan, serta informasi pemerintahan lainnya, baik di tingkat

daerah maupun pusat. Selain itu SIPD dapat digunakan untuk dapat mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah (Dione, 2020).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki tujuan yang sangat spesifik dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Salah satu aspek utama adalah memungkinkan kerjasama berbasis teknologi antara berbagai entitas di pemerintahan daerah. Manfaat teknologi informasi, SIPD memungkinkan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, untuk bekerja sama dalam pengembangan dan pemeliharaan basis data yang ada di daerah. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan electronic government atau e-government dalam melahirkan pemerintahan yang baik atau disebut sebagai good governance (Novita, Ningsih, & Sari, 2023). Langkah ini sangat penting dalam membangun dan memperkuat database yang ada di daerah, sehingga data yang relevan dapat diakses dengan lebih cepat dan akurat

Tujuan dari sistem ini juga termasuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui kerjasama berbasis teknologi, dengan tujuan membangun dan memperkuat database yang ada di daerah, serta menggambarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dalam mendukung pengembangan sistem informasi pengelolaan daerah yang akurat. Meningkatnya program pembangunan di berbagai bidang melalui penyampaian informasi dan melibatkan partisipasi yang luas dari seluruh individu, dengan memanfaatkan teknologi digital (Sandiasa & Agustana, 2018). Permasalahan dalam penerapan SIPD juga masih belum maksimalnya dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat, atau sektor swasta. Belum maksimalnya peraturan dalam pelaksanaan terkait dengan sanksi administratif bagi penanggung jawab SIPD menjadi kendala dalam penerapannya (Dione, 2020).

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2018 hingga 2020, telah memulai penggunaan aplikasi SIMDA secara penuh. Meskipun demikian, keterbatasan dalam hal Teknologi Informasi (IT) dan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu hambatan dalam implementasi aplikasi SIMDA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (Widiastuti, 2022).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul Analisis Implementasi Aplikasi Sistem

Informasi Pembangunan Daerah Pada Perangkat Daerah Di Kabupaten Sumbawa Barat. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui implementasi aplikasi sistem informasi pembangunan daerah pada perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa Barat, upaya yang dilakukan untuk memastikan keberlanjutan implementasi aplikasi sistem informasi pembangunan daerah pada perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa Barat, dan kendala yang dihadapi dalam implementasi aplikasi sistem informasi pada perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa Barat.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Adapun desain penelitian yang digunakan yaitu: membuat analisis masalah, menyusun rumusan masalah, menyusun analisis konsep dan teori yang relevan dengan penelitian, menentukan jenis penelitian, menyusun instrumen penelitian, melakukan pengambilan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dihasilkan dari sumber-sumber tulisan berupa data deskriptif yang dapat diamati langsung oleh peneliti sebagai fokus penelitian. (Moleong, 2018) menjelaskan penelitian kualitatif yaitu hasil dari penulis dalam bentuk tulisan yang dapat diamati oleh peneliti sebagai permasalahan yang akan diteliti. Penelitian yang peneliti lakukan yaitu menganalisis implementasi aplikasi sistem informasi pembangunan daerah pada perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa Barat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama. Sumber data primer yaitu Kepala BAPPEDA, Kepala Bidang, dan Kasubag dari OPD terkait yang digunakan sebagai sumber data. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu dengan memberi pertanyaan yang berkaitan dengan analisis implementasi aplikasi sistem informasi pembangunan daerah. Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang didapatkan secara langsung dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang ada di BAPPEDA dan OPD terkait tentang analisis implementasi aplikasi sistem informasi pembangunan daerah di Kabupaten Sumbawa Barat.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan meliputi meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data digunakan untuk menyederhanakan dan memilih suatu data yang dianggap penting dengan tujuan untuk memudahkan dalam memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Penyajian data yang diperoleh dari hasil wawancara selanjutnya ditabulasikan dan sebagai data penguat dari data observasi, dokumentasi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif berupa penelitian baru yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Kesimpulan dalam hal ini dapat berupa deskripsi atau gambaran dari data atau suatu objek yang sebelumnya masih belum dipahami. Setelah dilakukan penelitian data objek tersebut menjadi jelas masalahnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Pada Perangkat Daerah

SIPD merupakan sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah otonom dalam mengelola berbagai aspek administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Tujuan dari SIPD yaitu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan SIPD dapat mengelola sumber daya mereka dengan lebih baik, mengoptimalkan penggunaan anggaran, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Implementasi SIPD pada sepuluh OPD di Kabupaten Sumbawa Barat diterapkan sejak tahun 2020. Sistem SIPD menggunakan database awalnya secara nasional 2019 sosialisasi penggunaan SIPD PERPRES 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Launcing pertama oleh ketua KPK dan Mendagri. Latar belakang penggunaan SIPD dikarenakan adanya peraturan PERPRES. Adapun pihak yang terlibat dalam penerapan SIPD yaitu Sekretaris Daerah, Bappeda, BPKAD, Pendapatan, Kasie, Kasubag, Kabid, Sekdis dan Kepala Dinas di masing-masing OPD.

B. Kendala yang Ditemukan dalam Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Pada Perangkat Daerah

Pelaksanaan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) di Kabupaten Sumbawa Barat atau di daerah lainnya bisa dihadapkan pada sejumlah kendala yang perlu diatasi. Keterampilan dan pengetahuan staf yang terlibat dalam pengelolaan SIPD sangat penting. Keterbatasan tenaga ahli IT atau personel yang terlatih dalam penggunaan SIPD bisa menjadi hambatan. Gangguan pada sistem Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) selama penginputan data dapat menjadi tantangan yang mengganggu efisiensi penggunaan SIPD di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kurangnya bimbingan teknis bagi operator sehingga mempengaruhi proses penginputan. Hal ini seperti yang sesuai pernyataan dari (Vitriana, Agustiawan, & Ahyaruddin, 2022) OPD masih menghadapi tantangan dalam menerapkan SIPD, baik dalam hal sistemnya sendiri, sumber daya yang tersedia, komunikasi, maupun faktor-faktor lainnya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut seperti: melakukan pembimbingan dari sisi SDM, sedangkan dari sisi jaringan langsung dilakukan koordinasi dan konsultasi ke Pusat/Kepmendagri oleh admin SIPD Kabupaten. Tercapainya harapan dalam penggunaan SIPD, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan sinergi dalam memaksimalkan penerapannya (Sari, 2022).

Kurangnya bimbingan teknis dapat mempengaruhi proses penginputan data dalam SIPD. Bimbingan teknis yang tidak memadai dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk kesalahan dalam penginputan data, penurunan produktivitas, dan ketidakmampuan untuk memanfaatkan fitur-fitur SIPD secara optimal. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di bidang penginputan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi dalam lingkup administrasi badan pendapatan daerah. Keterbatasan tenaga kerja yang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam mengelola SIPD dapat menghambat proses penerapan SIPD. Selain itu, masalah lain yang sering muncul adalah jaringan internet yang sering mengalami gangguan atau eror, hal ini juga memengaruhi proses penerapan SIPD, terutama dalam hal penginputan data dan

koordinasi antar unit atau instansi yang menggunakan SIPD.

C. Upaya yang Dilakukan dalam Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Pada Perangkat Daerah

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) staf penting dilakukan sebagai upaya dalam implementasi SIPD di dinas Pemadam Kebakaran dan Pelayanan Kabupaten Sumbawa Barat. Koordinasi antar OPD sangat penting dalam penerapan SIPD. Koordinasi yang efektif dapat membantu memastikan bahwa SIPD digunakan dengan baik di seluruh pemerintah daerah, sehingga memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih terintegrasi dan efisien. Peningkatan kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) melalui pembelajaran online dan kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat membantu memaksimalkan manfaat SIPD. Peningkatan kinerja SIPD melalui Bimtek dan koordinasi antar OPD akan membantu memastikan bahwa SIPD digunakan secara maksimal dalam implementasi aplikasi sistem informasi. Materi bimtek dapat berupa pemahaman tentang fungsi dan fitur SIPD, serta penerapannya dalam tugas sehari-hari.

Latar belakang penggunaan SIPD dikarenakan adanya peraturan PERPRES No.39 Tahun 2019. Penerapan SIPD di Kabupaten Sumbawa Barat melibatkan berbagai pihak terkait diantaranya: Sekda, Bappeda, BPKAD, dan OPD. Bappeda memiliki tugas dalam melakukan pengelolaan memberikan informasi pembangunan daerah (Wurara et al., 2020). Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas dan mendorong pembentukan sistem data dan informasi pembangunan, data keuangan, dan juga informasi pemerintahan lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, baik di tingkat daerah maupun pusat (Nasution & Nurwani, 2021).

Aplikasi SIPD digunakan oleh pemerintah daerah, termasuk provinsi dan kabupaten/kota, dengan tujuan meningkatkan efektivitas, inovasi, dan juga percepatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi sistem informasi ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jumlahnya, namun juga penting untuk menganalisis hasil yang dihasilkan oleh SIPD, seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana

Kerja Anggaran (RKA). Penerapan SIPD dalam pelaksanaannya memiliki kendala yaitu kurangnya bimbingan teknis bagi operator sehingga mempengaruhi proses penginputan. Hal ini seperti yang sesuai pernyataan dari (Vitriana et al., 2022) OPD masih menghadapi tantangan dalam menerapkan SIPD, baik dalam hal sistemnya sendiri, sumber daya yang tersedia, komunikasi, maupun faktor-faktor lainnya.

Diterapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang wajib menyediakan informasi berupa informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah, membuat diterapkannya SIPD pada dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak tahun 2021. Penerapan ini dilakukan karena Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan semua pemerintah provinsi dan daerah untuk menggunakan aplikasi SIPD mulai dari tahun 2021 (Novita et al., 2023). Menurut (Ariyani & Maghfiroh, 2022) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 mengenai SIPD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang akuntabel, efisien, dan efektif, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

SIPD adalah sebuah sistem informasi yang bertujuan untuk memperbaiki dan mempermudah percepatan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dari perspektif komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi yang ada (Wurara et al., 2020). Secara keseluruhan pelaksanaan SIPD di lima OPD sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan Nomor 70 Tahun 2019 mengenai SIPD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang akuntabel, efisien, dan efektif, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan pada tahun 2021. SIPD yang diterapkan di masing-masing dinas tetap melakukan koordinasi yang bertujuan meningkatkan pelayanan seperti peningkatan sumber daya operator, perbaikan akses jaringan internet, dan mengikuti Bimtek.

Pemanfaatan sistem informasi di memiliki peran yang sangat baik dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas untuk memastikan akuntabilitas (Salain & Wedena, 2023). Koordinasi yang kuat antara Bappeda, Kadis, Sekdis, Kabid, dan Kepala Seksi/

Kasubag sangat penting dalam memastikan rencana pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Impelementasi sistem informasi ini, Kabupaten Sumbawa Barat berupaya mencapai pembangunan daerah yang lebih efisien, efektif, dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perkembangan daerah secara keseluruhan.

Jika terjadi komunikasi yang efektif antara mereka yang menjalankan kebijakan dan mereka yang membuat kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan efektif (Balqis & Fadhly, 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat (Dione, 2020) menyatakan staf yang cukup serta berkualitas sangat dapat membantu dalam menjalankan kebijakan dengan efektif dan sesuai sasaran. Oleh karena itu, sumberdaya staf harus memiliki keseimbangan yang baik, baik dalam hal kualitas maupun jumlah. Sumberdaya memegang peranan penting dalam menjalankan implementasi kebijakan, sehingga program dapat dijalankan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Setiawan, Amali, & Polin, 2023).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan yang dapat diberikan Implementasi aplikasi sistem informasi pembangunan daerah pada perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa Barat sudah diterapkan dengan baik, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk dapat memastikan keberlanjutan implementasi aplikasi sistem informasi pembangunan daerah dengan tetap melakukan koordinasi antar dinas terkait untuk memastikan SIPD berjalan dengan lancar. Adapun kendala yang dihadapi yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia dan masih belum adanya SOP terkait SIPD.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan dan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sinkronisasi penyesuaian dengan pembaharuan aplikasi sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dapat diterapkan dengan baik.
2. Koordinasi antar dinas terkait tetap dilakukan memastikan SIPD berjalan dengan lancar.

3. Diperlukan peningkatan Sumber Daya Manusia dan pembuatan SOP yang berkaitan dengan SIPD di OPD terkait

Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 156.
<https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.16753>

DAFTAR RUJUKAN

- Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4036-4043.
- Angguna, Y. P., Gani, A. Y. A., & Sarwono. (2015). Upaya Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Ariyani, A., & Maghfiroh, S. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Pegawai Pengguna Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Brebes. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 15022-15038.
- Atthahara, H. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government: Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Purwakarta. *Politikom Indonesiana*, 3(1), 66-77.
- Balqis, N., & Fadhly, Z. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 7(2), 117.
<https://doi.org/10.35308/jpp.v7i2.4246>
- Citra, N. (2023). *Selatan, Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan* (IPDN Kampus Jatinangor). IPDN Kampus Jatinangor. Retrieved from <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12523>
- Dione, F. (2020). Implementation of Regional Development Information System (SIPD) in Increasing Coordination of Regional Development. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 21-28.
<https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1061>
- Eldo, D. H. A. P., & Mutiarin, D. (2019). Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan "Kumis MbahTejo" di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 156.
<https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.16753>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufidah, L. E. H. F. (2018). Efektivitas Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(9), 1-8. Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/26725/>
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109.
<https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Novita, R., Ningsih, R. A., & Sari, S. S. (2023). Aktivitas Pengisian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Sekterariat Daerah Kabupaten Sumenep. *Jurnal Altifani*, 3(4), 545-552.
<https://doi.org/10.25008/altifani.v3i4.448>
- Pratama, R. N. (2023). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas*. Universitas Lampung.
- Ratnasari, D., & Tawakkal, H. A. (2019). *Analisis Dan Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Penelitian Dan Pengabdian*.
- Salain, P. P. P., & Wedena, I. K. J. (2023). Penerapan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Dalam Pelaksanaan Laporan Keuangan Di UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 453-458.
- Sandiasa, G., & Agustana, P. (2018). Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1-9. Retrieved from Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan

Kualitas Layanan Publik di Daerah.html

- Sari, D. N. (2022). Dalam Perencanaan Pembangunan Di Bappeda Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 4(4), 242–248.
- Setiawan, Z., Amali, L. N., & Polin, M. (2023). Analisis Evaluasi Kualitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan ISO/IEC 25010 di BAPPEDA Provinsi Gorontalo. *Diffusion: Journal of Systems and ...*, 3(1), 142–152. Retrieved from <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/diffusion/article/view/18310%0Ahttps://ejurnal.ung.ac.id/index.php/diffusion/article/viewFile/18310/5973>
- Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>
- Widiastuti, S. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Retrieved from Media jurnal indonesia website: <https://mediajurnalindonesia.id/ruang-menulis/implementasi-aplikasi-sistem-informasi-manajemen-daerah-simdadi-pemerintah-kabupaten-sumbawa-barat>
- Winarno, P., Kusnadi, A., & Afriliana, N. (2019). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tangerang. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 2, 117–123. <https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v2i0.500>
- Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1–13.